

VOL 8 NO. 3 (101-170) JULI 2023

ISSN 2502-1710

AGRIMOR

JURNAL AGRIBISNIS LAHAN
KERING
DOI 1032938/ag.v8i3



About the Journal

AGRIMOR is an open access journal. All articles published through a peer review process. It is published four times a year, in January, April, July and October. Each time published at least five articles. International Standard Serial Number (ISSN) of **AGRIMOR** is 2502-1710.

**Aims**

Publishes primary research papers and review articles in areas of agribusiness.

Scope

AGRIMOR covers the field of agribusiness that studies management and socio-economic in the field of farming, agroindustry, marketing, information and communication systems with based on dry land agriculture including aspects of government policy.

Publisher

Faculty of Agriculture, Timor University.

Address

Eltari street, Km. 9, Village Sasi, Kefamenanu – Timor – NTT. Postcode 85613.
e-mail: savana.cendana@gmail.com
CP: +6281315023025

Editorial Team

Responsible Person	: Boanerges Putra Sipayung, S.P., M.P.
Editor in Chief	: Simon Juan Kune, S.P., M.P.
Managing Editor	: Boanerges Putra Sipayung, S.P., M.P.
Section Editor	: Boanerges Putra Sipayung, S.P., M.P.
Copyediting	: Umbu Joka, S.P., M.Si.
Layout Editor	: Ody Wolfrit Matoneng, S.P., M.Si.
Production Editor	: Philip Yosua Th. Dima, S.T.
Editorial Board	: Campina Illa Pribantini, S.E., M.Si., Sembilanbelas November Kolaka University, Indonesia. Dennis Mark Onuigbo, B.Agric., M.Sc., University of Nigeria, Nsukka. Ture Simamora, S.Pt., M.Si., Timor University, Indonesia. Dudi Septiadi, S.Pd., M.Si., University of Mataram, Indonesia. Umbu Joka, S.P., M.Si., Timor University, Indonesia. Achmad Subchiandi Maulana, SP., M.Si., Timor University, Indonesia. Laura Juita Pinem, S.Si., M.Si., Prima Indonesia University, Indonesia.

Website

www.savana-cendana.id

Indexed in



Cover, editorial team, and table of contents can be download [here](#).

DOI: <https://doi.org/10.32938/ag.v8i3>

Published: 2023-08-04

Original research article

- Welfare Analysis of Rice Farmers in Jurangsapi Village, Tapen District, Bondowoso Regency Before and During The Covid-19 Pandemic**
 Robiatul Adawiyah, Harpowo Harpowo, M. Zul Mazwan 101-107

[pdf](#)
- Analysis of Structure, Behavior and Performance Market of Local Variety of Shallots in Sumenep District**
 Sindi Arista Rahman, Hopid Hopid, Purwati Ratna Wahyuni 108-116

[pdf](#)
- Leading Commodities and Competitiveness of the Agricultural Sector in Sijunjung Regency**
 Syahrial Syahrial, Pebry Aldy Saputra, Alvindo Dermawan 117-123

[pdf](#)
- Income Analysis of Banana Production in Sebatik Tengah District, Nunukan Regency Kalimantan Utara Province**
 Banyuriatiga Banyuriatiga 124-129

[pdf](#)
- Analysis of Profitability and Welfare Levels of Shallot Farmers in Mijen District Demak Regency**
 inayah rahmawati putri utami, Wiludjeng Rocssali, Siwi Gayatri 130-138

[pdf](#)
- Performance Management System in Rice Farming Using the KBPMS Approach: A Conceptual Framework**
 Rhanni Apriani Wirdhawan, Dermawan Wibisono 139-146

[pdf](#)
- Social and Economic Impacts of Agrotourism Development: A Study in Serang Village, Purbalingga Regency**
 Nindhia Lupita Wardhani, I Made Krisnajaya, Danang Wahansa Sugiarto 147-157

[pdf](#)
- Study Category and Knowledge Gap in the literature on Sustainable Standards and Coffee Certification**
 Muhammad Ibnu 158-170

[pdf](#)



ACCREDITATION STATUS



[Make a Submission](#)

Language

- [English](#)
- [Bahasa Indonesia](#)

Indexed in:



Statistic Journal

148056 View My Stats

Visitors	
ID 73,748	FR 41
US 2,587	PH 36
IN 240	ZA 36
SG 193	AU 36
MY 184	JP 35
CA 81	IE 34
NL 52	RU 32
TL 50	CZ 32
GB 47	DE 29

Pageviews: 149,035

Required Tools



Kategori Studi dan Kesenjangan Pengetahuan di Literatur Standar dan Sertifikasi Kopi Berkelanjutan

Muhammad Ibnu

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

*Correspondence author: muhammad.ibnu@fp.unila.ac.id

Article Info

Article history:

Received 02 February 2023

Received in revised form 12 February 2023

Accepted 25 March 2023

DOI: <https://doi.org/10.32938/ag.v8i3.2052>

Keywords:

Coffee

Knowledge gap

Literature review

Sustainability standards and certification

The theory of change

Abstract

Sustainability standards and certifications have become a trend in the coffee trade on the international market. Building on the foundation of the Theory of Change, sustainability and certification standards aim to enhance the economic, social and environmental sustainability of coffee. Although the literature on sustainability standards and certification is quite rich, studies evaluating them comprehensively are rare. The aim of this paper is to categorize the studies by theme and, based on existing knowledge gaps, provide recommendations for further research. This study used a qualitative approach and the research method was literature review. The review found that most of the studies were conducted using macro and managerial approaches, and knowledge gaps still exist in the literature. It is necessary to change the approach in future studies to address this knowledge gap. Further research is suggested to use micro-level analysis and bottom-up perspective (based on farmer's perspective) to generate empirical knowledge about social, economic, and environmental aspects of sustainability standards and certification.

1. Pendahuluan

Kopi adalah komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan di dunia, diekspor oleh enam puluh negara, dan ditanam oleh petani yang mayoritas adalah petani kecil (*smallholders*) (Pangabean *et al.*, 2021; Utrilla-Catalan *et al.*, 2022). Para pengimpor kopi, terutama negara-negara di Barat, telah menjadikan produk berbahan baku kopi sebagai produk industri unggulannya (*agro-food industry*). Namun demikian, dalam tren perdagangan internasional, berbagai isu menerpa komoditas pertanian- termasuk kopi- yang di ekspor ke dunia Barat seperti isu lingkungan (kerusakan hutan, pencemaran air dan lain sebagainya) dan isu sosial (ketimpangan gender, buruh anak di bawah umur, dan ketidakadilan bagi para pekerja kebun). Terlepas sebagai permainan perdagangan internasional atau tidak, isu-isu tersebut tampaknya berdampak pada kepercayaan masyarakat/ konsumen internasional terhadap produk kopi yang dikonsumsi.

Saat ini konsumen internasional membutuhkan produk kopi tidak hanya dalam wujud fisik (bentuk, warna, dan rasa) yang berkualitas baik, tetapi juga membutuhkan kepercayaan yang tinggi tentang bagaimana bahan baku (biji) kopi dihasilkan. Dunia bisnis internasional bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dunia Barat, memahami bahwa kepercayaan konsumen internasional sangat penting untuk dijaga dan diakomodasi. Mereka berargumen bahwa agar dapat memenuhi tuntutan kepercayaan konsumen internasional, suatu komoditas perlu memenuhi suatu standar yang mencakup tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan pemahaman tersebut, dunia bisnis dan LSM barat menciptakan gagasan dalam bentuk standar dan sertifikasi berkelanjutan (*sustainability standards and certification*) untuk komoditas-komoditas pertanian (termasuk kopi) yang diproduksi terutama di negara-negara berkembang.

Dimulai sejak tahun 1990-an, petani kopi di negara berkembang berhadapan dengan standar dan sertifikasi berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagian besar standar ini diprakarsai oleh organisasi non-pemerintah (LSM) yang bermitra dengan dunia bisnis dari dunia Barat. Pada awalnya partisipasi dalam standar dan sertifikasi bersifat sukarela, namun secara bertahap menjadi prasyarat *de-facto* bagi petani untuk mendapatkan akses ke pasar global (Rosenberg *et al.*, 2018; Arana-Coronado *et al.*, 2019; Fouilleux & Loconto, 2017).

Kopi merupakan industri pionir untuk standar dan sertifikasi berkelanjutan (Bager & Lambin, 2020; Dietz *et al.*, 2020; Partzsch *et al.*, 2021). Standar berkelanjutan didefinisikan sebagai dokumentasi perjanjian yang berisi kriteria-kriteria khusus (sebagai aturan, pedoman, atau definisi) untuk memastikan bahwa kopi ditanam, diproduksi, diperdagangkan, dan diproses dengan memperhatikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan (pilar berkelanjutan); dengan demikian berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan. Sertifikasi dipahami sebagai jaminan tertulis dari pihak ketiga (lembaga pemberi sertifikasi) bahwa suatu produk dan proses telah sesuai dengan standar berkelanjutan, sebagai instrumen utama untuk mengatur produksi pertanian (Winter *et al.*, 2020; DeFries *et al.*, 2017).

Pemrakarsa standar dan sertifikasi mengklaim bahwa gagasan mereka berdasarkan Teori Perubahan (*the theory of change*), walaupun dalam ulasan literatur para peneliti memiliki teori yang lain. Teori Perubahan memiliki premis bahwa pelatihan yang lebih baik dalam praktik pertanian,

dan organisasi petani yang lebih baik, dapat meningkatkan kuantitas (volume) dan kualitas (secara sosial, lingkungan, dan secara ekonomi) produksi. Diasumsikan bahwa produksi kopi yang lebih berkelanjutan pada akhirnya meningkatkan mata pencaharian petani kecil (Minten *et al.*, 2018; Winter *et al.*, 2020).

Para petani kecil saat ini dihadapkan pada berbagai jenis sertifikasi yang cakupan dan sejarahnya berbeda. Perkembangan sertifikasi global dimulai dengan perkembangan gerakan organik (tahun 1939), diikuti oleh Fair Trade (FT) pada tahun 1988, dan Rainforest Alliance (RA) pada tahun 1991. Satu dekade kemudian, lebih banyak sertifikasi diperkenalkan, termasuk UTZ di tahun 2002 dan Kode Umum Komunitas Kopi/*the Common Code for the Coffee Community* atau 4C pada tahun 2006 (Bager & Lambin, 2020; Partzsch *et al.*, 2021).

Semua skema sertifikasi tersebut memprioritaskan aspek produksi kopi berkelanjutan namun pada penekanan yang berbeda. Fair Trade (FT) memusatkan perhatian pada peningkatan aspek sosial produksi kopi, sedangkan UTZ fokus pada efisiensi pertanian dan keterlacakan (*traceability*) kopi (Ibnu, 2017; Dietz *et al.*, 2021). Rainforest Alliance (RA) berkonsentrasi pada aspek lingkungan (KPMG, 2013; Dietz *et al.*, 2021), sementara 4C - sebagai standar yang agak luas - menekankan kriteria dasar di semua dimensi pembangunan berkelanjutan (Global Coffee Platform/GCP, 2017).

Di Indonesia, sertifikasi RA dimulai di Provinsi Aceh pada tahun 1993, diikuti oleh FT di provinsi yang sama pada tahun 1997. UTZ terlibat di sektor kopi Indonesia pada tahun 2002, disusul oleh 4C pada tahun 2006 (Ibnu *et al.*, 2018). Skema-skema sertifikasi tersebut memang memiliki perbedaan penekanan, namun kesamaan cara pengelolannya, dan kesamaan kriteria berkelanjutan yang diadopsi, menyebabkan tumpang tindih dan persaingan yang signifikan di antara mereka (Glasbergen, 2018; Ibnu *et al.*, 2015).

Literatur tentang standar dan sertifikasi kopi berkelanjutan cukup kaya, dibuktikan dengan adanya berbagai studi yang telah dilakukan di negara-negara penghasil kopi, baik di Asia, Afrika, maupun di Latin Amerika. Namun, masih jarang studi yang mengulas secara komprehensif literatur standar dan sertifikasi kopi berkelanjutan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengategorikan studi-studi tersebut berdasarkan temanya, kemudian berdasarkan kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang ditemukan, memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana konteks penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah ulasan/tinjauan literatur (*literature review*). Studi-studi yang diulas telah dipublikasikan dan berasal dari tiga untaian literatur (*literature strand*), yaitu studi-studi yang bersifat empiris, studi-studi yang bersifat teoritis, dan studi-studi yang bersifat laporan. Studi-studi empiris menggunakan pendekatan kuantitatif (survei, analisis profitabilitas ekonomi, dan analisis statistik) dan kualitatif (observasi, wawancara, diskusi grup terfokus/*focus group discussion*, dan studi kasus). Studi-studi yang bersifat teoretis (*theoretical perspective*) menonjolkan pendekatan perspektif campuran (*mixed*) dari berbagai disiplin ilmu, termasuk politik, manajemen, dan agribisnis (sosial ekonomi pertanian). Studi-studi yang bersifat laporan berasal dari berbagai organisasi (yang terkait kopi) dan telah secara resmi dipublikasikan pula.

Sebagai bagian dari metode penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah mendapatkan studi-studi yang terkait dengan kopi menggunakan Google Cendikia, dilanjutkan dengan proses seleksi. Hanya studi yang relevan dengan standar dan sertifikasi berkelanjutan dipilih. Studi-studi tersebut kemudian dikelompokkan dan/atau dikategorikan berdasarkan tema penelitiannya. Studi-studi yang terkait dengan Indonesia dipisahkan secara khusus untuk diulas bagaimana konteks penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kategori Studi tentang Standar dan Sertifikasi Kopi Berkelanjutan

Berdasarkan fokus kajiannya, studi-studi tentang standar dan sertifikasi berkelanjutan untuk kopi dapat diklasifikasikan menjadi setidaknya tujuh kategori:

Pertama, kategori studi yang mengevaluasi dampak standar berkelanjutan dan sertifikasi kopi terhadap mata pencaharian (*livelihood*) dan pendapatan (*income*) petani kecil, kondisi lingkungan, dan aspek sosial. Hasil studi di kategori ini bervariasi sesuai dengan dampak yang diamati, dari positif hingga terbatas atau bahkan negatif. Studi yang menemukan dampak positif menyatakan bahwa sertifikasi meningkatkan pendapatan petani kecil melalui harga yang lebih tinggi serta peningkatan produktivitas dan kualitas (Snider *et al.*, 2017; Meemken, 2020). Bergabungnya petani dengan program sertifikasi juga meningkatkan keamanan kepemilikan

tanah, meningkatkan akses ke pendidikan, meningkatkan aset infrastruktur dan peluang investasi keuangan, dan meningkatkan akses ke air bersih (Pineda *et al.*, 2019).

Studi yang menemukan dampak 'sangat terbatas' atau 'cukup terbatas' menyatakan bahwa sertifikasi dapat meningkatkan pendapatan yang signifikan secara statistik, tetapi perbedaan pendapatan antara petani bersertifikat dan tidak bersertifikat sangat kecil (van Rijsbergen *et al.*, 2016) dan besarnya berbeda tergantung wilayah (Jena & Grote, 2022). Studi yang menemukan dampak terbatas juga mengklaim bahwa tidak semua skema sesuai atau cocok untuk petani kecil, karena harga premium terlalu kecil untuk mengompensasi upaya tambahan petani untuk memenuhi persyaratan sertifikasi (Glasbergen, 2018). Selain itu, konsumen dihadapkan pada semakin banyaknya label sertifikasi dan merek produk. Konsumen tidak selalu menyadari arti dan jaminan dari label tersebut, dan apakah klaim yang dibawa label tersebut dapat dipercaya. Akibatnya, hanya sebagian kecil pembeli yang siap membayar harga yang lebih tinggi untuk produk kopi bersertifikat (Ruggeri *et al.*, 2021).

Studi yang melaporkan efek negatif berpendapat bahwa sertifikasi menimbulkan biaya tambahan, khususnya biaya monitoring penerapan standar dan sertifikasi yang harus ditanggung petani. Monitoring penerapan standar menjadi rumit karena beberapa kriteria sulit diverifikasi, khususnya masalah sosial seperti hak-hak buruh. Hal ini selanjutnya dapat meningkatkan biaya sertifikasi, karena itu diragukan apakah petani kecil dapat menutupi biaya pertanian yang lebih tinggi tersebut (Albers *et al.*, 2021; Lemeilleur *et al.*, 2020). Dengan kata lain, standar dan sertifikasi ditemukan justru tidak menguntungkan petani secara ekonomi karena terdapat tambahan biaya bagi petani kopi untuk memenuhi syarat-syarat sertifikasi.

Secara umum, walaupun banyak yang bisa dipelajari dari kategori literatur pertama tersebut, masih banyak hal yang belum memuaskan. Studi-studi yang dilakukan memang telah menghasilkan bukti hasil evaluasi yang tidak sekedar anekdot, namun banyak yang masih kurang dalam hal relevansi statistik atau kurangnya kelompok kontrol yang memadai sehingga sulit menentukan hubungan kausalitas atau atributif. Dalam beberapa studi, evaluasi dampak yang dilakukan merupakan studi kasus satu kali atau sulit untuk ditiru dan tidak dapat dibandingkan dengan studi pada sektor atau wilayah lain. Hal-hal tersebut membuat sulit untuk menarik kesimpulan yang lebih luas dan dapat disepakati terkait dampak standar dan sertifikasi.

Kedua, kategori studi yang terkait dengan keabsahan (*legitimacy*) standar dan sertifikasi berkelanjutan. Dalam kategori ini, ada dua tema utama yang pada umumnya menjadi fokus kajian. Tema pertama adalah tentang legitimasi aktivitas aktor swasta (yang mengelola sertifikasi) versus kebijakan publik oleh otoritas negara. Pertanyaannya yang sering diajukan adalah apakah otoritas negara yang sah (pemerintah) menyetujui kriteria berbasis norma yang diusulkan oleh standar dan sertifikasi swasta, dan apakah pengaturan oleh swasta menciptakan ketegangan dengan pemerintah yang membuat kebijakan publik (Grabs, 2020; Tallberg *et al.*, 2018; Eberlein, 2019).

Tema kedua berpusat pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema sertifikasi. Masalah yang dibahas dalam kategori ini adalah bagaimana sertifikasi dapat diarusutamakan di sektor kopi negara berkembang yang memiliki struktur organisasi yang luas dan beragam yang melekat pada sektor kopi di negara-negara tersebut (karena perbedaan sejarah, politik, manajemen produksi, dan portofolio kopi dalam struktur perekonomian mereka). Pertanyaan yang diajukan berkonsentrasi pada bagaimana legitimasi dari standar dan sertifikasi berkelanjutan di pasar kopi yang dituju (Ehrlich, 2018; Dietz *et al.*, 2021; Bager & Lambin, 2020; Partzsch *et al.*, 2021), bagaimana standar dan sertifikasi berkelanjutan menangani masalah legitimasi di tingkat produsen (Maguire-Rajpaul *et al.*, 2020), dan bagaimana standar dan sertifikasi dapat memperoleh legitimasi mereka secara demokratis (Grabs, 2020).

Ketiga, kategori studi yang berfokus pada distribusi kekuasaan dalam rantai nilai (*value chain*) kopi dalam kaitannya dengan perubahan kelembagaan yang ditimbulkan oleh standar dan sertifikasi berkelanjutan. Konsep rantai nilai global (*global value chain/GVC*) dan kemitraan sering digunakan dalam kategori literatur ini.

Dari perspektif GVC, studi-studi yang membahas tren ketidaksetaraan kekuasaan di antara para pelaku utama menyimpulkan bahwa petani, pedagang lokal, dan pemerintah di negara-negara produsen semakin lemah dan/atau terpinggirkan, terutama sejak deregulasi dan liberalisasi sektor kopi diberlakukan tahun 1990-an (Babin, 2020). Studi juga mengklaim bahwa proses liberalisasi telah menghasilkan pemusatan kekuasaan di tangan perusahaan-perusahaan multinasional yang bertindak sebagai pedagang dan pengolah kopi (Barjolle *et al.*, 2017). Perusahaan-perusahaan besar tersebut membentuk struktur rantai kopi baru melalui kemampuan mereka untuk mengatur akses produsen ke konsumen akhir, yang selanjutnya merefleksikan dominannya peran regulasi swasta global di sektor kopi (Bartley, 2022).

Dari perspektif kemitraan, studi-studi terdahulu mengkaji standar dan sertifikasi sebagai platform yang dilembagakan sebagai wadah kolaborasi antara petani kopi, perusahaan, dan aktor lain (seperti LSM dan kelompok masyarakat sipil) (Lambin & Thorlakson, 2018; Grabs, 2020, 2017).

Platform kelembagaan ini merupakan pemrakarsa penting perubahan dalam sistem kopi petani kecil seperti peningkatan nilai tambah dan akses masuk pasar. Topik lain dikategori ini mencakup jenis pengaturan kelembagaan yang paling menjanjikan untuk mengatasi masalah berkelanjutan yang kompleks, berlapis-lapis, dan multi-skala (van Hille *et al.*, 2020), dan bagaimana menjaga kesetaraan, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan di antara para aktor di rantai nilai kopi (Sengere *et al.*, 2019).

Keempat, kategori literatur yang mempertimbangkan kemampuan petani kecil untuk berkompetisi dalam rantai nilai ekspor komoditas pertanian. Di satu sisi, standar berkelanjutan dan sertifikasi dianggap sebagai hambatan utama bagi petani kecil untuk dapat mengakses pasar global. Akar masalahnya adalah kompetensi petani yang belum berkembang (pengetahuan, keterampilan) dan kapasitas keuangan, organisasi, dan kelembagaan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi (Naegele, 2020; Ibnu *et al.*, 2018). Produsen dengan keahlian rendah kurang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan menganggap sertifikasi hanya sebagai hambatan baru non-tarif yang mengurangi peluang ekspor. Di sisi lain, terdapat studi yang berargumen bahwa hambatan yang disebabkan oleh standar berkelanjutan dan sertifikasi 'layak' atau 'perlu' dilakukan untuk memotivasi petani agar lebih kompeten dan mampu menangkap peluang ekonomi yang signifikan rantai nilai kopi yang lebih pendek (Furumo *et al.*, 2020; Jena & Grote, 2017).

Kelima, kategori literatur yang mengidentifikasi, dari perspektif yang lebih teoritis, pendorong utama munculnya standar dan sertifikasi berkelanjutan. Kategori literatur ini memunculkan tiga teori sebagai pendorong utama standar dan sertifikasi, yaitu preemtif peraturan pemerintah, penanganan informasi asimetris, dan penargetan langsung perusahaan oleh organisasi non pemerintah (LSM) (Lachaud, 2018).

Teori pertama berakar pada kelembagaan politik, melihat munculnya standar dan sertifikasi dari perspektif aktor sosial (LSM) dan menilai standar dan sertifikasi sebagai proyek peningkatan kapasitas kelembagaan yang digerakkan oleh LSM untuk mencapai tujuan mereka (Abbott & Snidal, 2021). Daripada bersikap konfrontatif terhadap perusahaan atau mencoba mempengaruhi perilaku perusahaan melalui lobi pemerintah untuk menerapkan standar/peraturan, LSM menggunakan strategi kerja sama terhadap perusahaan, di mana standar dan sertifikasi adalah contoh yang paling menonjol. Standar dan sertifikasi juga telah dianggap oleh banyak LSM sebagai cara untuk melewati hambatan politik.

Teori kedua, yang berakar pada ekonomi kelembagaan, dimulai dari perspektif perusahaan dan menyoroti pentingnya informasi asimetris yang muncul melalui tindakan LSM yang sering 'mempermalukan' dan permintaan konsumen akan produk etis. Dalam perspektif ini, perusahaan memiliki insentif untuk memecahkan masalah informasi asimetris dengan membuat atau bergabung dengan inisiatif standar dan sertifikasi (Lachaud, 2018). Selain itu, perusahaan mungkin memiliki insentif untuk terlibat dalam penetapan dan adopsi standar karena meningkatkan kepercayaan konsumen dalam keamanan dan kualitas produk, dan karenanya meningkatkan permintaan konsumen; atau karena standar dan sertifikasi dapat digunakan sebagai alat strategis untuk membedakan produk, sehingga menciptakan segmentasi pasar dan memperlunak persaingan (Abbott & Snidal, 2021).

Teori ketiga, mengikuti karya pemenang Nobel George Stigler, menganggap standar dan sertifikasi sebagai mekanisme yang mendahului peraturan pemerintah (Abbott & Snidal, 2021). Perusahaan swasta dapat memilih tingkat standar yang meminimalkan biaya mereka sendiri sebelum pemerintah menetapkan kebijakan publik. Hal ini dianggap menguntungkan swasta karena kebijakan swasta cenderung lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan selera dan preferensi konsumen serta perubahan teknologi (Braun, 2019). Diskusi tentang pendorong kemunculan dan perkembangan standar dan sertifikasi ini menunjukkan bahwa beberapa aktor (terutama LSM) memiliki insentif yang kuat untuk mengembangkan dan bekerja dengan standar dan sertifikasi; dengan demikian, secara struktural memasukkan mereka ke dalam konstelasi yang lebih besar dari tata kelola regulasi transnasional (Ruggie, 2014).

Keenam, kategori studi literatur tentang standar dan sertifikasi berkelanjutan yang diprakarsai oleh negara-negara berkembang. Sebagai penghasil produk pertanian, negara-negara berkembang mulai memberikan respons dengan membentuk standar dan sertifikasi nasional sebagai kontra inisiatif atau inisiatif tandingan dari standar dan sertifikasi global yang digagas dunia barat (Ibnu, 2020; Marques & Eberlein, 2021; Langford, 2019). Sebagai contoh ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang telah diterapkan untuk sawit, dan mulai dibahasnya penerapan ISCoffee (*Indonesian Standard Coffee*) untuk kopi dan ISCocoa (*Indonesian Standard Cocoa*) untuk kakao.

Inisiatif tandingan tersebut muncul karena kelompok pemangku kepentingan di negara berkembang tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil standar dan sertifikasi dunia barat (Horner & Nadvi, 2018). Kelompok pemangku kepentingan, terutama pemerintah, menganggap bahwa tanggung jawab mereka untuk mengatur sektor pertanian dan untuk menegaskan identitas

bangsanya melalui standar dan sertifikasi nasional (Marques & Eberlein, 2021). Beberapa poin diskusi dalam kategori literatur ini adalah apakah negara akan bertanggung jawab atas perubahan sistem, apakah negara dapat menghindari masalah dalam penegakan aturan dan regulasi berkelanjutan (Glasbergen & Schouten, 2015), dan apakah standar dan sertifikasi yang berbasis di negara berkembang dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan di pasar global (Bernstein & Van Der Ven, 2017).

Terkait ISCoffee, walaupun belum diimplementasikan secara resmi, pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan inisiatif publik tersebut kepada para pemangku kepentingan di beberapa daerah penghasil kopi (misalnya, Lampung dan Nusa Tenggara Barat). Sosialisasi ini mencakup penetapan proyek percontohan dan kriteria verifikasi untuk asosiasi pedagang, pemerintah daerah, dan organisasi petani (Media Perkebunan, 2013). Pemerintah berharap dapat menerapkan ISCoffee sepenuhnya dalam waktu dekat dan dapat menjadi standar dan sertifikasi yang prospektif dalam perdagangan internasional, terutama di pasar kopi baru (di Asia dan Afrika) yang baru-baru ini mengambil alih Eropa sebagai tujuan utama ekspor kopi Indonesia (Meier *et al.*, 2020).

Ketujuh, kategori studi yang memiliki pendekatan berorientasi pada masalah (*problem-driven approach*) sebagai titik awal perubahan, untuk melihat bagaimana perbaikan dapat dilakukan, sekaligus memberi manfaat pada kondisi lingkungan. Dari perspektif ini, standar dan sertifikasi hanyalah salah satu faktor dalam proses perubahan, di antara banyak faktor lainnya. Perspektif ini juga menyiratkan bahwa fokusnya harus pada kontribusi relatif standar dan sertifikasi terhadap transformasi berkelanjutan di sektor pertanian dengan jutaan petani yang terlibat. Meskipun penting, literatur dalam kategori ini berpendapat bahwa pendekatan rantai nilai (di mana standar dan sertifikasi berperan) terlalu terbatas untuk membawa perubahan berkelanjutan dan meningkatkan mata pencaharian petani kecil, dan oleh karena itu perlu cara alternatif dan tambahan (Hospes *et al.*, 2017).

Argumen utama studi dalam kategori adalah pertanian konvensional juga telah memiliki pilar berkelanjutan walaupun tanpa standar dan sertifikasi. Dengan kata lain, produksi pertanian yang berkelanjutan (dengan sertifikasi) dan konvensional (tanpa sertifikasi) semakin sejajar atau tidak banyak berbeda (Tal, 2018). Banyak studi dalam kategori ini mempertanyakan manakah yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pertanian yang berkelanjutan: mempromosikan pasar khusus dari standar dan sertifikasi swasta sukarela atau meningkatkan dan mempercepat pertanian konvensional yang sudah berubah (secara ekonomi, sosial, dan lingkungan).

Dalam kategori literatur ini, paradigma yang paling menonjol adalah paradigma intensifikasi berkelanjutan (Xie *et al.*, 2021; Chen & Jin, 2019). Paradigma ini mengedepankan bagaimana mengoptimalkan produksi (dalam kuantitas dan kualitas) relatif terhadap input (misalnya tanah, air, pupuk, tenaga kerja), sambil meminimalkan eksternalitas negatif (misalnya, polusi, penggundulan hutan, pengikisan tanah dan pencemaran sumber daya air). Intensifikasi berkelanjutan juga mencakup diversifikasi mata pencaharian yang semakin krusial untuk memungkinkan rumah tangga pedesaan tetap mempertahankan pertanian mereka (Mohammed *et al.*, 2021; Danso-Abbeam *et al.*, 2020). Untuk sektor kopi, diversifikasi ditujukan agar petani lebih terlibat dalam kegiatan tambahan non-pertanian dan memiliki variasi dalam komoditas yang mereka hasilkan (Salvioni *et al.*, 2020).

Konteks Disinsentif Penerapan Standar dan Sertifikasi Keberlanjutan di Indonesia

Standar dan sertifikasi berkelanjutan yang ada di Indonesia (Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, 4C, dan organik) diterapkan melalui perusahaan pemanggang (*roasting*) multinasional dan/atau perusahaan pengeksport. Standar dan sertifikasi tersebut dapat disebut sebagai skema global utama (*the mainstream global certification schemes*) versi swasta (Pancsira, 2022; Chkanikova & Sroufe, 2021). Namun, selain skema *mainstream* tersebut, di Indonesia terdapat juga sertifikasi berbasis lokal/nasional. Contohnya adalah Inofice (Indonesian Organic Farming Certification) yang menyertifikasi kopi dan produk pertanian lainnya berdasarkan kriteria organik Standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, terdapat sertifikasi indikasi geografis (IG) dan ISCoffee (Indonesian Standard Coffee). IG dianggap sebagai hak kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang merek nasional (UU RI No 15 tahun 2001). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan secara formal bahwa komoditas pertanian tertentu berasal dari lingkungan geografis tertentu, sehingga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut asli dan spesifik untuk suatu daerah. Terkait ISCoffee, sertifikasi ini diprakarsai oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan diterapkan secara resmi, ISCoffee diharapkan menjadi standar dan sertifikasi keberlanjutan (versi publik atau pemerintah) pertama untuk kopi di Indonesia (Ibnu, 2020).

Terlepas dari versinya (publik atau swasta), kopi bersertifikat dipromosikan ke konsumen berdasarkan aspek lingkungan dan sosial dari keberlanjutan produksi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa petani kopi Indonesia lebih memilih skema sertifikasi yang utamanya

menawarkan keuntungan ekonomi (Ibnu *et al.*, 2015). Dengan demikian, sertifikasi yang dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong keberlanjutan, ternyata diterima oleh petani untuk menjadi alat ekonomi. Hal ini tidak berarti bahwa petani kopi Indonesia tidak menghargai aspek lingkungan dan sosial dari produksinya, tetapi preferensi mereka mengenai skema sertifikasi lebih condong ke aspek ekonomi, yaitu pendapatan. Studi juga menemukan bahwa petani yang berpartisipasi dalam skema sertifikasi lebih memilih hubungan yang longgar dengan pedagang, sehingga mereka dapat dengan mudah beralih antara pasar bersertifikat dan tidak bersertifikat (Astuti *et al.*, 2015). Temuan ini lebih lanjut menyiratkan bahwa banyak petani menunjukkan perilaku yang oportunistis (Astuti *et al.*, 2015; Ibnu *et al.*, 2015).

Selain itu, petani pada umumnya kurang memahami filosofi di balik konsep keberlanjutan dalam produksi pertanian; mereka hanya mengikuti aturan yang diberlakukan pada mereka (oleh standar dan sertifikasi). Temuan ini tercermin dalam penelitian tentang penjelasan untuk partisipasi dalam skema sertifikasi. Di antara berbagai faktor penjas yang dianalisis, motivasi ekonomi adalah motivasi yang paling kuat bagi petani untuk berpartisipasi dalam standar dan sertifikasi (Ibnu *et al.*, 2016; Ibnu, 2019).

Temuan-temuan di atas perlu ditafsirkan sebagai '**konteks disinsentif**' penerapan sertifikasi keberlanjutan dan perannya dalam transformasi menuju sistem produksi kopi yang lebih berkelanjutan. Studi-studi lain mempertegas penafsiran tersebut.

Pertama, terjadi kelebihan produksi kopi bersertifikat di pasar internasional saat ini. Penyerapan kopi bersertifikat baru mencapai 34 % oleh pasar kopi dunia pada tahun 2016 (Voorra *et al.*, 2019). Dengan kata lain, permintaan pasar (domestik dan internasional) untuk kopi bersertifikat masih lebih rendah dibandingkan produksi yang dihasilkan petani (Snider *et al.*, 2017; Liu, 2020). Hal ini menciptakan situasi di mana kopi bersertifikat dijual di pasar konvensional dan sebaliknya, sehingga berpengaruh terhadap minat petani untuk bergabung dalam sertifikasi (Glasbergen, 2018). Dari sudut pandang pasar liberal, hal ini mungkin tidak menjadi masalah (karena petani punya pilihan pasar), tetapi ini menjadi indikator penting bahwa saat ini standar dan sertifikasi berkelanjutan terlembaga dengan lemah dalam praktik petani.

Kedua, meskipun prospek harga premium sangat penting bagi petani untuk memutuskan berpartisipasi, petani tidak selalu menerima premium untuk kopi bersertifikat mereka (Wahyudi *et al.*, 2020). Meskipun petani menerima harga premium, perbedaan harga kopi sertifikasi dengan kopi non-sertifikasi tidak signifikan (van Rijsbergen *et al.*, 2016). Dengan kata lain, sertifikasi memiliki manfaat ekonomi yang terbatas. Hal ini tidak hanya menghalangi petani yang tidak bersertifikat (petani konvensional) untuk bergabung, tetapi juga menurunkan motivasi petani bersertifikat untuk tetap mengikuti program (Ibnu, 2019). Situasi ini selanjutnya juga dapat mempengaruhi apakah budidaya kopi masih menarik bagi petani. Keuntungan petani dari kopi bervariasi dari waktu ke waktu, dan meskipun, misalnya, petani arabika di Aceh biasanya menerima harga yang lebih tinggi daripada petani Robusta di Lampung, bukan berarti kesejahteraannya juga lebih tinggi (Ibnu, 2017). Ini menyiratkan bahwa pendapatan dari kopi mungkin gagal untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dan petani selanjutnya dapat memutuskan untuk beralih ke tanaman lain, mengubah profesi mereka atau bermigrasi ke lingkungan perkotaan. Jika tren seperti ini terus berlanjut, kaum muda mungkin lebih suka mencari pekerjaan di kota dan akibatnya sektor kopi mungkin sebagian besar dikelola oleh para petani yang sudah berusia tua, yang pada akhirnya melemahkan kinerja sektor tersebut secara keseluruhan. Selain itu, tanpa mata pencaharian alternatif, petani mungkin tidak dapat keluar dari kondisi kehidupan (*livelihood*) yang tidak layak. Para petani seperti ini mungkin menjual kopi mereka dengan harga rendah yang selanjutnya dapat menyebabkan kelebihan pasokan kopi murah dan berkualitas rendah.

Ketiga, menurunnya minat petani terhadap produksi kopi karena tanaman lain, seperti kelapa sawit atau kakao, dianggap sebagai investasi yang lebih menguntungkan daripada kopi. Hal ini semakin menurunkan investasi pemerintah dan swasta di sektor kopi (Sustainable Coffee Program/SCP, 2014). Pemerintah tampaknya lebih memberikan prioritas pada makanan pokok (misalnya padi dan palawija) daripada kopi sehingga kebijakan menjadi kurang proaktif (misalnya, untuk layanan penyuluhan) dan investasi yang rendah di sektor kopi (misalnya, infrastruktur dan fasilitas pedesaan). Masalah lainnya adalah bahwa meskipun petani memproduksi sebagian besar untuk pasar domestik dan ekspor, produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan relatif rendah. Salah satu masalahnya adalah rendahnya profesionalisme petani (pengetahuan dan keterampilan dalam produksi, pemrosesan, dan pemasaran) (Padmaningrum, 2019). Akses yang terbatas ke keuangan dan input yang terjangkau, dan akses yang sulit ke daerah terpencil (karena kondisi jalan yang buruk) turut berperan menjelaskan mengapa banyak petani tidak terorganisir dengan baik dan bergantung pada pedagang perantara (tengkulak) untuk memasarkan kopi mereka.

Keempat, petani kopi umumnya bekerja dengan dukungan terbatas dari layanan penyuluhan, yang mengakibatkan pemahaman petani yang terbatas pula tentang praktik

pertanian yang baik (*good agricultural practices*), organisasi petani yang lemah, dan penolakan terhadap perubahan (Wahyudi *et al.*, 2020; Glasbergen, 2018). Semua kekurangan ini selanjutnya mengakibatkan lemahnya pemahaman petani tentang konsep keberlanjutan dalam produksi kopi. Studi juga menyimpulkan bahwa sistem sertifikasi saat ini terinternalisasi dengan lemah dalam praktik petani, yang selanjutnya berkontribusi pada rendahnya tingkat adopsi sertifikasi oleh petani (pada tahun 2014 hanya 7% dari kopi Indonesia yang diekspor disertifikasi) (Sustainable Coffee Program/SCP, 2014). Membandingkan antara Robusta dan Arabika, Robusta membutuhkan tingkat pengetahuan dan keterampilan pemrosesan yang lebih rendah daripada Arabika (yang sebagian besar diproduksi sebagai kopi spesial di Indonesia). Oleh karena itu, petani kopi di Indonesia (dan juga di Vietnam dengan lebih dari 80% adalah petani Robusta) mungkin memiliki tingkat profesionalisme yang lebih rendah (setidaknya dalam hal pengolahan kopi) daripada petani Arabika misalnya di Brasil (dengan lebih dari 80% adalah petani Arabika) (Sustainable Coffee Program/SCP, 2014). Perbedaan antara Arabika dan Robusta tidak hanya mempengaruhi tingkat profesionalisme petani tetapi juga nilai pasar untuk produk tersebut, yang selanjutnya menentukan permintaan dan harga. Karena umumnya Robusta diproduksi dengan perbedaan kualitas yang relatif kecil, maka Robusta sering kali dijual dalam jumlah besar (sebagai komoditi), dan permintaan pasar mungkin hanya terfokus pada harga yang terendah (Davis *et al.*, 2022; Hämäläinen, 2018).

Kelima, terbentuknya tren pasar baru yang relatif 'kurang peduli' dengan sertifikasi. Banyak negara penghasil kopi, termasuk Indonesia, mengeksport kopinya ke pasar Utara (di dunia Barat, misalnya Eropa dan Amerika, dan Jepang) dan Selatan (non-Barat, misalnya Cina, India, dan negara-negara Timur Tengah). Pasar Utara cenderung menuntut tingkat keamanan pangan yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik dan memberlakukan persyaratan berkelanjutan yang lebih ketat untuk komoditas tropis daripada pasar Selatan. Pasar Utara untuk kopi masih didominasi oleh Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia, Prancis, Spanyol, dan Swedia (FAOSTAT, 2022). Standar dan sertifikasi tidak didistribusikan secara merata di pasar konsumen di Utara ini. Kopi organik lebih penting di Jerman, Kanada, Australia, Italia, dan Amerika Serikat. Fair Trade dominan di Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (Torga & Spers, 2020). Rainforest Alliance adalah pemimpin di Jepang dan juga penting di Eropa Barat (Munasinghe *et al.*, 2021). Utz yang sekarang merger dengan Rainforest Alliance memegang posisi kuat di beberapa pasar Eropa utara (Piãoa *et al.*, 2019). Namun, dalam beberapa tahun terakhir pasar Selatan telah melampaui pasar Utara sebagai tujuan ekspor utama kopi Indonesia (Sustainable Coffee Program/SCP, 2014; Wahyudi *et al.*, 2020). Pasar Selatan ini, termasuk pasar domestik yang tumbuh cepat, tidak mensyaratkan kopi (ataupun produk lain seperti minyak sawit) untuk harus disertifikasi (Schleifer & Sun, 2018; Lo, 2022; Voora *et al.*, 2019).

Keenam, penelitian tidak menunjukkan indikasi transformasi ke produksi yang lebih berkelanjutan dalam jangka pendek (yang didorong oleh sertifikasi swasta global). Hal serupa terjadi pula dengan standar dan sertifikasi berkelanjutan yang diprakarsai oleh pemerintah negara-negara berkembang (standar dan sertifikasi versi publik). Sebagai penghasil produk pertanian, negara-negara berkembang memberikan respons dengan membentuk standar dan sertifikasi nasional sebagai kontra inisiatif dari standar dan sertifikasi global yang digagas dunia barat (Ibnu, 2020; Marques & Eberlein, 2021). Sebagai contoh adalah ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang telah diterapkan untuk sawit, dan telah dibahasnya penerapan ISCoffee (*Indonesian Standard Coffee*) untuk kopi, dan ISCocoa (*Indonesian Standard Cocoa*) untuk kakao.

Kontra inisiatif atau inisiatif tandingan ini muncul karena kelompok pemangku kepentingan di negara berkembang tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil standar dan sertifikasi dunia barat (Marques & Eberlein, 2021). Namun, keraguan muncul terkait kemampuan ISCoffee untuk menjadi sertifikasi yang diterima dan layak di pasar internasional. Beberapa penelitian berpendapat bahwa standar dan sertifikasi Selatan mungkin mendapatkan relevansi di pasar domestik mereka sedangkan standar dan sertifikasi Utara akan lebih banyak diminta dalam perdagangan internasional (Ibnu, 2020; Langford, 2019). Analisis tentang kapasitas implementasi ISCoffee menunjukkan bahwa kapasitas implementasi ISCoffee cukup rendah, terutama karena struktur administrasi yang lemah dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Akibatnya, ISCoffee akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan petani di sektor kopi, seperti akses pasar yang terbatas, produktivitas dan kualitas yang rendah, dan organisasi petani yang belum mendukung. Studi juga menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek, ISCoffee mungkin belum mampu menjadi alternatif yang layak untuk standar dan sertifikasi swasta yang berbasis di Utara (Ibnu, 2020).

Ketujuh, standar dan sertifikasi yang dirancang untuk diterapkan secara global harus berhadapan dengan para petani yang beroperasi pada konteks lokal. Para petani kopi berada dalam ruang lingkup ekonomi lokal karena produksi dan konsumsi mereka sebagian besar dilakukan secara lokal. Salah satu masalah yang diamati adalah petani sering mulai menjual kopi mereka

dalam dua minggu pertama setelah panen ke pengumpul atau pedagang lokal (Ibnu, 2017). Mereka memiliki beberapa alasan, namun alasan utamanya adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Ini menyiratkan bahwa banyak petani tidak terhubung dengan pasar yang lebih menguntungkan yang menyeimbangkan antara kualitas dan harga (Glasbergen, 2018). Sertifikasi mengklaim dapat mengatasi masalah ini, tetapi mengharuskan petani untuk mengatur diri mereka sendiri dalam organisasi petani terlebih dahulu (Ibnu, 2022).

Kedelapan, manifestasi organisasi petani di Indonesia cukup beragam baik jenis maupun tingkat kematangannya. Tiga jenis organisasi petani yang berperan dalam sektor kopi, yaitu kelompok tani, koperasi, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Ibnu et al., 2018). Organisasi-organisasi ini memiliki karakteristik organisasi yang berbeda karena mereka didukung oleh kementerian yang berbeda, dan saat ini diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda. Analisis tentang manfaat yang dirasakan dari sertifikasi dan organisasi petani dari sudut pandang petani menunjukkan bahwa sertifikasi menciptakan peluang pasar dan memberikan pelatihan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani (peningkatan kapasitas) (Ibnu et al., 2018). Sebagian besar pelatihan berlangsung dalam kelompok, yang selanjutnya dapat memperkuat perasaan memiliki komunitas dan berkontribusi pada persepsi yang lebih tinggi tentang manfaat sosial berorganisasi. Studi menemukan bahwa organisasi di mana petani bersertifikasi berpartisipasi sering kali memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan petani yang tidak bersertifikat, misalnya dalam bentuk rutusnya aktivitas-aktivitas pertemuan dan pelatihan yang diprakarsai pengelola sertifikasi (Ibnu et al., 2018).

Namun, temuan-temuan positif tentang organisasi petani belum mengubah gambaran utama tentang kurangnya organisasi petani yang berfungsi dengan baik sehingga menghambat kegiatan kolektif (Wahyudi et al., 2020). Permasalahan terkait organisasi petani agak sulit untuk ditangani karena kurangnya perhatian terhadap penyebab masalah, seperti kepemimpinan yang tidak kompeten dan kurangnya motivasi di antara petani untuk berorganisasi (Ibnu et al., 2018). ISCoffee memiliki peluang untuk meningkatkan peran organisasi tani, namun yang menjadi permasalahan adalah organisasi formal seperti Kelompok tani dan koperasi kemungkinan tidak berkinerja baik kecuali jika mencapai tingkat kematangan tertentu. Faktanya, banyak dari mereka tidak berfungsi dengan baik dan mungkin tidak mencapai kematangan organisasi dalam jangka pendek (Elhakim & Leovita, 2020; Wiguna et al., 2019). Pendekatan *top-down* yang diinisiasi pemerintah pusat dalam mendirikan organisasi formal terkesan agak mengabaikan permasalahan tersebut, sedangkan inisiasi pemerintah daerah terkait pengembangan organisasi petani juga masih sangat terbatas (Syahyuti et al., 2014).

Kesenjangan Pengetahuan (*Knowledge Gap*) dan Penelitian Selanjutnya

Studi tentang standar dan sertifikasi berkelanjutan tampaknya menggunakan pendekatan makro. Pada umumnya rekomendasi yang muncul adalah perbaikan pada ruang lingkup sertifikasi dengan mempertahankan premis dari teori sertifikasi (*the theory of change*). Namun, teori sertifikasi bukanlah obat mujarab untuk masalah petani kecil di negara-negara berkembang penghasil kopi, termasuk Indonesia. Berdasarkan tinjauan literatur di atas, premis dari teori sertifikasi belum dikatakan terbukti sepenuhnya. Dampak aktual standar dan sertifikasi berkelanjutan masih ambigu dan diperdebatkan (antara dampak positif, dampak tidak signifikan, dan dampak negatif).

Para pendukung sertifikasi menganggap kepatuhan pada prinsip dan kriteria sertifikasi sebagai jalan/*pathway* menuju keberlanjutan dalam produksi kopi (Giuliani et al., 2017; Jena & Grote, 2022). Namun, pandangan ini terbuka untuk kritik bahwa kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria sertifikasi tidak selalu menguntungkan petani kecil (van Rijsbergen et al., 2016; Astuti et al., 2015; Ibnu, 2017). Dengan kata lain, para pengkritik secara implisit mengklaim bahwa standar dan sertifikasi berkelanjutan mungkin belum tentu menjadi jalan/*pathway* terbaik untuk produksi kopi yang lebih berkelanjutan karena manfaatnya yang terbatas bagi petani kecil. Di bawah naungan sertifikasi, petani kecil masih menjadi pelaku yang paling rentan dan terlemah dalam rantai nilai. Faktor utama yang membuat mereka rentan adalah ketidakpastian akses pasar dan gejolak harga di pasar (Glasbergen, 2018).

Sebagian besar penelitian tampak pula mengambil pendekatan yang manajerial, dalam arti bahwa para peneliti mempelajari bagaimana skema berkembang dalam praktik dan bagaimana kinerjanya dapat ditingkatkan. Dengan mengadopsi pendekatan semacam ini, para peneliti secara implisit menerima definisi masalah dari sudut pandang pemrakarsa sertifikasi yang berbasis di dunia barat.

Definisi masalah dari sudut pandang pemrakarsa sertifikasi tampaknya terlalu sederhana dibandingkan realitas petani kecil di negara-negara berkembang. Petani kecil beroperasi dalam sistem yang kompleks, ditandai dengan keterkaitan yang kuat antara keputusan pertanian dan non-pertanian, dan antara kebutuhan pangan dan non-pangan. Petani juga memiliki preferensi

dan kebutuhannya sendiri, yang menginformasikan tindakan mereka terkait dengan produksi, pemasaran, dan partisipasi dalam sertifikasi. Mereka sering kali didorong oleh tujuan yang saling bertentangan, seperti keputusan untuk berdedikasi penuh pada aktivitas pertanian versus pilihan untuk mengejar aktivitas non-pertanian.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, masih terdapat kelemahan di dalam literatur tentang Standar dan sertifikasi berkelanjutan. Kelemahan literatur pada umumnya terkait dua aspek, yaitu pendekatan penelitian dan cakupan lokasi (*geographical coverage*) penelitian.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mayoritas studi dilakukan dengan pendekatan makro dan manajerial. Distribusi lokasi penelitian masih kurang seimbang karena pada umumnya penelitian mengenai standar dan sertifikasi berkelanjutan dilakukan di negara-negara Afrika dan Latin Amerika. Penelitian terkait di Asia, terutama di Indonesia, masih relatif kurang walaupun menunjukkan tren yang meningkat.

Standar dan sertifikasi pada dasarnya adalah salah satu bentuk intervensi (dari luar) ke dalam sebuah sistem. Agar intervensi tersebut efektif, kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang bersumber dari kelemahan di literatur perlu diisi oleh penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan tingkat mikro dan perspektif *bottom-up* (berdasarkan perspektif petani). Secara lebih detail, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah:

Pertama, standar dan sertifikasi keberlanjutan harus dibuat lebih mudah diakses oleh petani kecil. Salah satu caranya adalah harmonisasi standar dan sertifikasi, karena beragamnya skema sertifikasi dan persaingan antar mereka menyebabkan kebingungan petani. Penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana harmonisasi berbagai standar dan sertifikasi dapat mengarah pada satu set standar yang disepakati secara internasional. Studi selanjutnya juga perlu mengeksplorasi bagaimana standar nasional, seperti ISCoffee, dapat menjadi batu loncatan menuju standar yang diterima secara global.

Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi kopi petani, misalnya melalui penyuluhan yang lebih baik. Saat ini, layanan penyuluhan di sektor kopi, terutama di Indonesia, cukup langka. Studi masa depan mungkin perlu fokus pada desain sistem penyuluhan yang memungkinkan untuk secara efektif menyeimbangkan faktor-faktor yang bersaing, misalnya antara lingkungan dan ekonomi.

Ketiga, permintaan pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan standar dan sertifikasi berkelanjutan. Oleh karena itu, studi masa depan harus memperhatikan peluang untuk meningkatkan sistem pemasaran yang mendorong permintaan yang lebih besar untuk kopi bersertifikat dan memberikan kemudahan penjualan bagi petani.

Keempat, pada umumnya petani kecil berpartisipasi dalam sertifikasi melalui organisasi petani, baik koperasi maupun kelompok tani. Namun, organisasi petani cenderung lemah dalam manajemen dan kekurangan sumber daya yang berkualitas, dan mereka sangat bervariasi dalam hal kapasitas organisasinya. Penelitian di masa depan mungkin perlu terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengategorikan organisasi petani berdasarkan kapasitas mereka. Kategori yang terdefinisi dengan baik berguna untuk memetakan organisasi petani yang ada dan, jika pengembangan kapasitas diperlukan, kategori tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan yang dihasilkan dari pelatihan dan proses pembelajaran lainnya.

Kelima, partisipasi petani dalam standar dan sertifikasi berkelanjutan terutama didorong oleh kombinasi akses pasar dan harga premium. Namun, standar dan sertifikasi berkelanjutan beroperasi dalam konteks permintaan terbatas untuk kopi bersertifikat dan ketidakpastian tentang harga premium. Ini menyiratkan bahwa, agar tetap inklusif (yaitu, memberikan manfaat bagi petani), penelitian di masa depan perlu berfokus pada bagaimana standar dan sertifikasi keberlanjutan dapat merangkul model bisnis yang, misalnya, memiliki relevansi ekonomi yang lebih besar bagi petani. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat meningkatkan fokus mereka pada masalah yang terkait dengan produksi, seperti bagaimana petani dapat mengatasi perubahan iklim (misalnya, peningkatan suhu dan berkurangnya curah hujan) dan mengurangi risiko gagal panen (karena hama dan penyakit).

Simpulan

Literatur dalam bidang standar dan sertifikasi berkelanjutan cukup kaya dengan berbagai studi yang telah dilakukan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengategorikan studi-studi tersebut berdasarkan temanya, kemudian berdasarkan kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang ditemukan, memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana konteks penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia.

Berdasarkan ulasan literatur, tampak bahwa petani kecil di sebagian besar studi dianggap sebagai objek perubahan. Dengan demikian, realitas yang dihadapi petani kecil dalam praktik

sehari-hari, dan interpretasi mereka terhadap proses penciptaan nilai melalui standar dan sertifikasi berkelanjutan seolah-olah kurang diperhatikan. Hal ini merupakan kesenjangan pengetahuan utama yang ditemukan di literatur standar dan sertifikasi berkelanjutan. Kesenjangan pengetahuan tersebut perlu diatasi dengan mengubah pendekatan penelitian, yaitu menggunakan analisis tingkat mikro dan perspektif *bottom-up*.

Terkait penerapan standar dan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia, ulasan literatur menunjukkan bahwa standar dan sertifikasi berkelanjutan swasta merupakan inisiator penting perubahan di bidang perdagangan komoditas pertanian dalam arti menciptakan kesadaran akan aspek keberlanjutan produksi komoditas pertanian. Kesadaran ini tampaknya berlaku juga untuk upaya pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara berkembang lainnya, untuk menyelaraskan kebijakan mereka (melalui sertifikasi versi publik) dengan tujuan keberlanjutan. Dalam ruang lingkup sertifikasi, masih ada potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan oleh karena itu berpotensi juga meningkatkan kapasitas pendapatan para petani. Namun, ulasan literatur juga menempatkan standar dan sertifikasi keberlanjutan dalam perspektif yang tidak pasti. Hal ini terutama berkaitan dengan kapasitas transformatif yang dimiliki sertifikasi untuk membawa perubahan sistemis keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan tidak memulai penelitian dengan definisi masalah dari sudut pandang sertifikasi, tetapi dengan masalah yang dihadapi petani. Dengan begitu diharapkan penelitian menghasilkan pengetahuan empiris tentang aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari standar dan sertifikasi berkelanjutan berdasarkan perspektif petani. Pendekatan tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan 'kepekaan' berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun para peneliti, untuk menciptakan situasi kondusif bagi petani dalam rangka menginternalisasikan pilar-pilar pembangunan pertanian (ekonomi, sosial, dan lingkungan) berkelanjutan ke dalam praktik sehari-hari mereka.

Pustaka

- Abbott, K.W. & Snidal, D. 2021. The governance triangle: Regulatory standards institutions and the shadow of the state. *The Spectrum of International Institutions: An Interdisciplinary Collaboration on Global Governance*. Routledge, hal.52-91.
- Albers, H.J., Brockmann, S. & Ávalos-Sartorio, B. 2021. Assessing policies to mitigate abandonment of shade-grown coffee production in forest systems amid low and uncertain prices. *Environment and Development Economics*, 26(4): 403-428.
- Arana-Coronado, J.J., Trejo-Pech, C.O., Velandia, M. & Peralta-Jimenez, J. 2019. Factors Influencing Organic and Fair Trade Coffee Growers Level of Engagement with Cooperatives: The Case of Coffee Farmers in Mexico. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 31(1): 22-51.
- Astuti, E.S., Offermans, A., Kemp, R. & Cörvers, R. 2015. The impact of coffee certification on the economic performance of Indonesian actors. *Asian Journal of agriculture and development*, 12(1362-2017-749): 1-16.
- Babin, N. 2020. Class differentiation, deagrarianization, and repeasantization following the coffee crisis in Agua Buena, Costa Rica. *Journal of Agrarian Change*, 20(1): 113-136.
- Bager, S.L. & Lambin, E.F. 2020. Sustainability strategies by companies in the global coffee sector. *Business Strategy and the Environment*, 29(8): 3555-3570.
- Barjolle, D., Quiñones-Ruiz, X.F., Bagal, M. & Comoé, H. 2017. The role of the state for geographical indications of coffee: Case studies from Colombia and Kenya. *World Development*, 98: 105-119.
- Bartley, T. 2022. Power and the Practice of Transnational Private Regulation. *New Political Economy*, 27(2): 188-202.
- Bernstein, S. & Van Der Ven, H. 2017. Best practices in global governance. *Review of International Studies*, 43(3): 534-556.
- Braun, B. 2019. Building global institutions: The diffusion of management standards in the world economy - an institutional perspective. *Linking Industries Across the World: Processes of Global Networking*. Routledge, hal.3-27.
- Chen, X. & Jin, H. 2019. A Case Study of Enhancing Sustainable Intensification of Chinese Torreya Forest in Zhuji of China. *Environment and Natural Resources Research*, 9(2): 53.
- Chkanikova, O. & Sroufe, R. 2021. Third-party sustainability certifications in food retailing: Certification design from a sustainable supply chain management perspective. *Journal of Cleaner Production*, 282: 124344.
- Danso-Abbeam, G., Dagunga, G. & Ehiakpor, D.S. 2020. Rural non-farm income diversification: implications on smallholder farmers' welfare and agricultural technology adoption in Ghana. *Heliyon*, 6(11): e05393.
- Davis, A.P., Kiwuka, C., Faruk, A., Walubiri, M.J. & Kalema, J. 2022. The re-emergence of Liberica

- coffee as a major crop plant. *Nature Plants*, 8(12): 1322–1328.
- DeFries, R.S., Fanzo, J., Mondal, P., Remans, R. & Wood, S.A. 2017. Is voluntary certification of tropical agricultural commodities achieving sustainability goals for small-scale producers? A review of the evidence. *Environmental Research Letters*, 12(3): 33001.
- Dietz, T., Estrella Chong, A., Grabs, J. & Kilian, B. 2020. How Effective is Multiple Certification in Improving the Economic Conditions of Smallholder Farmers? Evidence from an Impact Evaluation in Colombia's Coffee Belt. *Journal of Development Studies*, 56(6): 1141–1160.
- Dietz, T., Grabs, J. & Chong, A.E. 2021. Mainstreamed voluntary sustainability standards and their effectiveness: Evidence from the Honduran coffee sector. *Regulation and Governance*, 15(2): 333–355.
- Eberlein, B. 2019. Who fills the global governance gap? Rethinking the roles of business and government in global governance. *Organization Studies*, 40(8): 1125–1145.
- Ehrlich, S.D. 2018. *The politics of fair trade: Moving beyond free trade and protection*. Oxford University Press.
- Elhakim, S.K. & Leovita, A. 2020. Model Penguatan Kelembagaan Asosiasi Kopi Minang Sumatera Barat Menuju Manajemen Inovasi Dalam Memperkuat Kearifan Lokal. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 1(1).
- FAOSTAT 2022. *Crops and livestock products: coffee*. FAO United Nations. Tersedia di <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> [Accessed 10 Juli 2022].
- Fouilleux, E. & Loconto, A. 2017. Voluntary standards, certification, and accreditation in the global organic agriculture field: a tripartite model of techno-politics. *Agriculture and Human Values*, 34(1): 1–14.
- Furumo, P.R., Rueda, X., Rodriguez, J.S. & Parés Ramos, I.K. 2020. Field evidence for positive certification outcomes on oil palm smallholder management practices in Colombia. *Journal of Cleaner Production*, 245: 118891.
- Giuliani, E., Ciravegna, L., Vezzulli, A. & Kilian, B. 2017. Decoupling Standards from Practice: The Impact of In-House Certifications on Coffee Farms' Environmental and Social Conduct. *World Development*, 96: 294–314.
- Glasbergen, P. 2018. Smallholders do not eat certificates. *Ecological Economics*, 147: 243–252.
- Glasbergen, P. & Schouten, G. 2015. Transformative capacities of global private sustainability standards: A reflection on scenarios in the field of agricultural commodities. *Journal of Corporate Citizenship*, (58): 85–101.
- Global Coffee Platform/GCP 2017. *4C Baseline common code v.2.1*. Accessed on May 18, 2020 at http://www.globalcoffeeplatform.org/assets/files/GCP_Doc_01_Baseline-Common-Code_v2.1_en.pdf.
- Grabs, J. 2017. The rise of buyer-driven sustainability governance: emerging trends in the global coffee sector.
- Grabs, J. 2020. Assessing the institutionalization of private sustainability governance in a changing coffee sector. *Regulation and Governance*, 14(2): 362–387.
- Hämäläinen, M. 2018. Better Coffee? The Intertwining of Ethics and Quality in the Third-Wave Coffee Subculture. (December). Tersedia di <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/296483>.
- van Hille, I., de Bakker, F.G.A., Ferguson, J.E. & Groenewegen, P. 2020. Cross-sector partnerships for sustainability: How mission-driven conveners drive change in national coffee platforms. *Sustainability*, 12(7): 2846.
- Horner, R. & Nadvi, K. 2018. Global value chains and the rise of the Global South: unpacking twenty-first century polycentric trade. *Global Networks*, 18(2): 207–237.
- Hospes, O., Kroeze, C., Oosterveer, P., Schouten, G. & Slingerland, M. 2017. New generation of knowledge: Towards an inter-and transdisciplinary framework for sustainable pathways of palm oil production. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, 80: 75–84.
- Ibnu, M. 2017. *Gatekeepers of Sustainability: On coffee smallholders, standards and certifications in Indonesia*. Maastricht University, the Netherlands.
- Ibnu, M. 2019. Determinan Partisipasi Petani Kopi dalam Standar dan Sertifikasi Berkelanjutan Common Code for Coffee Community (4C). *Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar*, 6(3): 135.
- Ibnu, M. 2020. Toward a More Sustainable Coffee Production: the Implementation Capacity of Indonesian Standard Coffee. *Pelita Perkebunan*, 35(3): 212–229.
- Ibnu, M. 2022. A Systemic Approach For a Sustainable Coffee Production in Indonesia. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 16(1): 15.
- Ibnu, M., Glasbergen, P., Offermans, A. & Arifin, B. 2015. Farmer preferences for coffee certification: A conjoint analysis of the Indonesian smallholders. *Journal of Agricultural Science*, 7(6): 20.
- Ibnu, M., Offermans, A. & Glasbergen, P. 2018. Certification and farmer organisation: Indonesian smallholder perceptions of benefits. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3): 387–415.
- Ibnu, M., Offermans, A., Glasbergen, P. & Ismono, H. 2016. Competing explanations for Indonesian

- smallholder participations in sustainability coffee certifications. *Journal of economics and sustainable development*, 7(24).
- Jena, P.R. & Grote, U. 2017. Fairtrade certification and livelihood impacts on small-scale coffee producers in a tribal community of India. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 39(1): 87–110.
- Jena, P.R. & Grote, U. 2022. Do Certification Schemes Enhance Coffee Yields and Household Income? Lessons Learned Across Continents. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5: 716904.
- KPMG 2013. *Improving smallholder livelihoods: Effectiveness of certification in coffee, cocoa and cotton*. Accessed on May 18, 2020 at http://sustaineo.org/wpcontent/uploads/2018/01/Improving-smallholderlivelihoods-Effectiveness-of-certification-incoffeecocoa-and-cotton_study-commissioned-by-SUSTAINEO.pdf.
- Lachaud, E. 2018. The General Data Protection Regulation and the rise of certification as a regulatory instrument. *Computer Law & Security Review*, 34(2): 244–256.
- Lambin, E.F. & Thorlakson, T. 2018. Sustainability standards: Interactions between private actors, civil society, and governments. *Annual Review of Environment and Resources*, 43: 369–393.
- Langford, N.J. 2019. The Governance of Social Standards in Emerging Markets: An exploration of actors and interests shaping Trustea as a Southern multi-stakeholder initiative. *Geoforum*, 104: 81–91.
- Lemeilleur, S., Subervie, J., Presoto, A.E., Souza Piao, R. & Saes, M.S.M. 2020. Coffee farmers' incentives to comply with sustainability standards. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 10(4): 365–383.
- Liu, E. 2020. *The Coffee in Your Cup: Reviewing Fair Trade's Impact on Development*. *Oswald Research and Creativity Competition*, Accessed on May 18, 2020 at <https://uknowledge.uky.edu/oswald/28/>.
- Lo, K. 2022. *Certifying China: the rise and limits of transnational sustainability governance in emerging economies*. *Environmental Politics*. MIT Press.
- Maguire-Rajpaul, V.A., Rajpaul, V.M., McDermott, C.L. & Pinto, L.F.G. 2020. Coffee certification in Brazil: compliance with social standards and its implications for social equity. *Environment, Development and Sustainability*, 22(3): 2015–2044.
- Marques, J.C. & Eberlein, B. 2021. Grounding transnational business governance: A political-strategic perspective on government responses in the Global South. *Regulation and Governance*, 15(4): 1209–1229.
- Media Perkebunan 2013. *Indonesian Standart Coffee (ISCoffee) Segera Diterapkan*. Tersedia di http://www.mediaperkebunan.net/index.php?option=com_contentandview=a%0Articleandid=637:indonesian-sta-segeraditerapkanandcatid=%0A2:komoditiandItemid=26.%0A [Accessed 24 April 2014].
- Meemken, E.-M. 2020. Do smallholder farmers benefit from sustainability standards? A systematic review and meta-analysis. *Global Food Security*, 26: 100373.
- Meier, C., Sampson, G., Larrea, C., Schlatter, B., Voora, V., Dang, D., Bermudez, S., Wozniak, J. & Willer, H. 2020. The state of sustainable markets 2020: Statistics and emerging trends. *ITC: Geneva, Switzerland*.
- Minten, B., Dereje, M., Engida, E. & Tamru, S. 2018. Tracking the Quality Premium of Certified Coffee: Evidence from Ethiopia. *World Development*, 101: 119–132.
- Mohammed, K., Batung, E., Kansanga, M., Nyantakyi-Frimpong, H. & Luginaah, I. 2021. Livelihood diversification strategies and resilience to climate change in semi-arid northern Ghana. *Climatic Change*, 164(3–4): 1–23.
- Munasinghe, A., Cuckston, T. & Rowbottom, N. 2021. Sustainability certification as marketisation: Rainforest Alliance in the Sri Lankan tea production industry. *Accounting Forum*. Taylor & Francis, hal.247–272.
- Naegele, H. 2020. Where does the Fair Trade money go? How much consumers pay extra for Fair Trade coffee and how this value is split along the value chain. *World Development*, 133: 105006.
- Padmaningrum, D. 2019. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Manajemen Kelembagaan Petani Kopi Robusta Temanggung Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Indikasi Geografis. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2): 8–13.
- Pancsira, J. 2022. International Coffee Trade: a literature review. *Journal of Agricultural Informatics*, 13(1).
- Panggabean, Y.B.S., Arsyad, M., Mahyuddin & Nasaruddin 2021. Coffee farming business development: E-commerce technology utilization. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, hal.32011.
- Partzsch, L., Hartung, K., Lümmer, J. & Zickgraf, C. 2021. Water in your coffee? Accelerating SDG 6 through voluntary certification programs. *Journal of Cleaner Production*, 324: 129252.

- Piãoa, R.S., Fonseca, L.S., de Carvalho Januário, E. & Saesb, M.S.M. 2019. Certification: Facts, challenges, and the future. *Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil: A Volume in the Consumer Science and Strategic Marketing Series*, 109.
- Pineda, J.A., Piniero, M. & Ramirez, A. 2019. Coffee production and women's empowerment in Colombia. *Human Organization*, 78(1): 64–74.
- van Rijsbergen, B., Elbers, W., Ruben, R. & Njuguna, S.N. 2016. The Ambivalent Impact of Coffee Certification on Farmers' Welfare: A Matched Panel Approach for Cooperatives in Central Kenya. *World Development*, 77: 277–292.
- Rosenberg, L., Swilling, M. & Vermeulen, W.J.V. 2018. Practices of Third Wave Coffee: A Burundian Producer's Perspective. *Business Strategy and the Environment*, 27(2): 199–214.
- Ruggeri, G., Corsi, S. & Nayga, R.M. 2021. Eliciting willingness to pay for fairtrade products with information. *Food Quality and Preference*, 87: 104066.
- Ruggie, J.G. 2014. Global governance and “new governance theory”: Lessons from business and human rights. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 20(1): 5–17.
- Salvioni, C., Henke, R. & Vanni, F. 2020. The impact of non-agricultural diversification on financial performance: Evidence from family farms in Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 12(2): 486.
- Schleifer, P. & Sun, Y. 2018. Emerging markets and private governance: the political economy of sustainable palm oil in China and India. *Review of International Political Economy*, 25(2): 190–214.
- Sengere, R.W., Curry, G.N. & Koczberski, G. 2019. Forging alliances: Coffee grower and chain leader partnerships to improve productivity and coffee quality in Papua New Guinea. *Asia Pacific Viewpoint*, 60(2): 220–235.
- Snider, A., Gutiérrez, I., Sibelet, N. & Faure, G. 2017. Small farmer cooperatives and voluntary coffee certifications: Rewarding progressive farmers of engendering widespread change in Costa Rica? *Food Policy*, 69: 231–242.
- Sustainable Coffee Program/SCP 2014. *Indonesia a business case for sustainable coffee production*. Accessed on May 18, 2020 at <http://www.sustainablecoffeeprogram.com/en/resources>.
- Syahyuti, S.W., Suhaeti, R.N., Zakaria, A.K. & Nurasa, T. 2014. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian. *Laporan Hasil Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor*.
- Tal, A. 2018. Making conventional agriculture environmentally friendly: moving beyond the glorification of organic agriculture and the demonization of conventional agriculture. *Sustainability*, 10(4): 1078.
- Tallberg, J., Bäckstrand, K. & Scholte, J.A. 2018. *Legitimacy in global governance: Sources, processes, and consequences*. Oxford University Press.
- Torga, G.N. & Spers, E.E. 2020. Perspectives of global coffee demand. *Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil: A Volume in the Consumer Science and Strategic Marketing Series*. Elsevier, hal.21–49.
- Utrilla-Catalan, R., Rodríguez-Rivero, R., Narvaez, V., Díaz-Barcos, V., Blanco, M. & Galeano, J. 2022. Growing Inequality in the Coffee Global Value Chain: A Complex Network Assessment. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2): 672.
- Voorra, V., Bermúdez, S. & Larrea, C. 2019. *Global market report: Coffee*. International Institute for Sustainable Development Winnipeg, MB, Canada.
- Wahyudi, A., Wulandari, S., Aunillah, A. & Alouw, J.C. 2020. Sustainability certification as a pillar to promote Indonesian coffee competitiveness. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, hal.12009.
- Wiguna, S., Karimi, S. & Ridwan, E. 2019. Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai Pengembangan Perekonomian Petani Kopi di Pedesaan. *Agriekonomika*, 8(1): 93–103.
- Winter, E., Marton, S.M.R.R., Baumgart, L., Curran, M., Stolze, M. & Schader, C. 2020. Evaluating the Sustainability Performance of Typical Conventional and Certified Coffee Production Systems in Brazil and Ethiopia Based on Expert Judgements. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4: 49.
- Xie, H., Huang, Y., Choi, Y. & Shi, J. 2021. Evaluating the sustainable intensification of cultivated land use based on emergy analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 165: 120449.